

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam hidupnya di dunia pasti mengalami 3 (tiga) peristiwa yang penting, yaitu kelahiran, perkawinan, dan kematian. Pada waktu seseorang dilahirkan, maka ia dalam hidupnya akan mengemban hak dan kewajiban. Kemudian setelah ia dewasa akan bertemu dengan kawan hidupnya untuk melakukan perkawinan dan membangun sebuah rumah tangga yang langgeng sampai akhir hayat. Hingga pada suatu saat manusia tersebut akan mengalami kematian atau meninggal dunia.¹ Jika kita berbicara mengenai seseorang yang meninggal dunia, apa yang akan terjadi dengan segala sesuatu harta benda yang di tinggalkan tersebut. Terkait dengan hal itu tentunya jalan pikiran kita langsung akan tertuju kepada masalah warisan.²

Ketentuan mengenai hukum waris di dalam KUHPerdara dapat kita lihat dalam Pasal 830 KUHPerdara, bahwa “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Dengan demikian pengertian hukum waris menurut KUHPerdara, ialah tanpa adanya orang yang mati dan meninggalkan harta kekayaan maka tidak ada masalah pewarisan.³ Pada Pasal 874 yang berisi “Bahwa segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah”.

¹ Ali Afandi, 1986, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT Bina Aksara, Hal 5.

² Oemarsalim, 1991, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, Hal 1.

³ Hilman Hadikusuma, 1991, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hal 5.

J. Satrio berpendapat, pengertian Hukum Waris pada pokoknya adalah suatu peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain. Lebih jelasnya adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan yang berwujud perpindahan kekayaan si pewaris dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris, baik dalam hubungan sesama ahli waris, maupun antara mereka dengan pihak ketiga. Karena pada dasarnya kita baru akan berbicara tentang masalah pewarisan kalau ada orang yang mati, ada harta yang ditinggalkan, dan ada ahli waris.⁴

Konsep pewarisan timbul karena terjadinya suatu peristiwa kematian yang menimpa seseorang dari anggota keluarga, terutama orang tua yaitu ayah dan ibu. Apabila orang yang meninggal tersebut memiliki harta kekayaan, yang menjadi masalah bukan peristiwa kematian itu, melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh almarhum. Masalahnya yang akan muncul siapakah yang berhak atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh almarhum tersebut. Dan siapa yang wajib menanggung dan menyelesaikan utang-piutang almarhum jika dia meninggalkan utang yang menjadi kewajibannya.⁵

Ketentuan tentang pembagian warisan (boedel-scheiding) sesungguhnya bukan semata-mata menyangkut pembagian warisan, tetapi juga berarti pemisahan harta boedel, yaitu harta kekayaan bersama yang belum terbagi, yaitu berupa harta bersama perkawinan, harta warisan. Dalam hal pewarisan, apabila semua ahli waris dapat bertindak bebas dengan harta benda mereka dan para waris itu semua

⁴ *Ibid.*, Hal 6.

⁵ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hal 193.

berada di tempat, maka pembagian harta warisan itu dilakukan dengan cara sedemikian rupa oleh para waris sendiri (KUHPerdara Pasal 1069).⁶

Hal ini berarti bahwa bagaimana cara pembagian itu diserahkan kepada kebijaksanaan para ahli waris sendiri, karena dalam perundang-undangan tidak menentukan cara-cara pembagian yang harus ditempuh. Tetapi jika ada diantara para ahli waris yang menolak atau melalaikannya, maka atas permintaan para pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat memerintahkan *weeskamer* (Balai Harta Peninggalan) untuk bertindak mewakili para ahli waris yang menolak atau melalaikan untuk melaksanakan perjanjian pembagian warisan itu (KUHPerdara Pasal 1071).⁷

Peristiwa yang sering terjadi dalam pelaksanaan pembagian warisan adalah salah satu pihak dengan cara melakukan perbuatan yang melawan hukum melakukan penguasaan sepihak terhadap harta warisan yang seharusnya dibagi. Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk dapat menguasai harta warisannya secara pribadi.

Dalam proses penyelesaian sengketa pembagian harta warisan, langkah yang harus dilakukan adalah ahli waris yang merasa kepentingannya dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Sebagaimana telah dijelaskan dalam KUHPerdara Pasal 834 yang berbunyi: "*Tiap-tiap waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka yang licik telah menghentikan penguasaannya...*".

⁶ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, Hal 214.

⁷ *Ibid*

Adapun terkait kewenangan Pengadilan Negeri mengadili perkara perdata mencakup perkara perdata dalam bentuk gugatan dan perkara permohonan. Perkara perdata gugatan adalah perkara yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih yang disebut penggugat dan tergugat. Sedangkan perkara permohonan adalah perkara yang tidak mengandung sengketa dan hanya ada satu pihak yang disebut pemohon. Perkara yang tidak mengandung sengketa disebut juga dengan perkara volunter, sedangkan perkara yang mengandung sengketa disebut perkara contensius.

Terkait kewenangan Pengadilan Negeri, dalam hukum acara perdata dikenal 2 macam kewenangan, yakni: (1) Wewenang mutlak atau *absolute competentie*; (2) Wewenang relative atau *relative competentie*. Wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan.⁸ Dilihat dari macam-macam pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili, dan dalam bahasa Belanda disebut *attributie van rechtsmacht*.

Dari uraian tersebut maka penulis terdorong untuk mengambil sebuah judul penelitian; **TINJAUAN YURIDIS PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARISAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sragen)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Hakim dalam menentukan pembuktian atas sengketa pembagian harta warisan ?

⁸ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009, *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, Hal 11.

2. Bagaimana Hakim dalam memutuskan terhadap sengketa pembagian harta warisan yang berlaku ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis menarik tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui Hakim dalam menentukan pembuktian atas sengketa pembagian harta warisan.
2. Mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutuskan terhadap sengketa pembagian harta warisan yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

Setelah menjelaskan mengenai tujuan dari penelitian ini, maka manfaat yang diharapkan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan, wawasan, kemampuan menulis dan memberikan gambaran yang jelas dalam bidang hukum perdata khususnya dalam permasalahan penyelesaian sengketa pembagian warisan di Pengadilan Negeri.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat memberi sumbangsih kemasyarakat khususnya masyarakat yang membutuhkan pengetahuan mengenai hukum perdata yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa terhadap pembagian harta warisan.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini dapat menambah sumbangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perdata khususnya hukum perdata yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa terhadap pembagian harta warisan, sehingga penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti-peneliti.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁹ Oleh karena itu sebelum penulis melakukan penelitian, hendaknya penulis menentukan terlebih dahulu mengenai metode yang hendak dipakai dalam suatu penelitian. Adapun metode yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dilihat dari sudut tujuan penelitian hukum, metode pendekatan yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode normatif, karena hukum dikonsepsikan sebagai norma patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁰ Sehingga penulis akan mencari dan menganalisis kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pembagian harta warisan.

⁹ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, Hal 1.

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hal 118.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif. “Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bersifat melukiskan atau dapat dikatakan tidak jauh berbeda dari sifat menjelajah”.¹¹ Jadi penulis akan melukiskan secara sistematis dan menyeluruh tentang substansi yang ada dalam Putusan Perdata mengenai Sengketa Pembagian Warisan.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sebagai sumber datanya yang digunakan data primer dan data sekunder. Adapun data-data dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

a. Data Sekunder

Data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primernya adalah:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) HIR/RBg
- c) Jurisprudensi (Keputusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap)

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum perjanjian, buku tentang hukum waris, buku tentang wanprestasi, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, atau pendapat para pakar hukum yang relevan dengan penelitian ini.

¹¹ Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.hlm. 10.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, dan bahan pustaka lainnya.

b. Data Primer

Adapun yang dimaksud dengan data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yaitu dengan melakukan penelitian langsung di lapangan.

1) Lokasi Penelitian

Dalam hal ini penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Sragen. Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara mengenai proses penyelesaian sengketa pembagian harta warisan. Dan pemilihan wilayah di Kota Surakarta itu sendiri supaya mudah dijangkau oleh peneliti, karena peneliti berdomisili di wilayah Sragen, sehingga dapat mempermudah dan memperlancar dalam penyusunan dan penulisan penelitian ini.

2) Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menetapkan subyek-subyek yang diteliti yaitu dengan informan atau responden yang berkompeten dalam proses penyelesaian sengketa pembagian harta warisan, yaitu: Hakim Pengadilan Negeri Sragen.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu:

a. Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan dengan menggunakan metode:

1) Studi Kepustakaan

Metode studi kepustakaan ini yang dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis serta mempelajari data-data sekunder yang terdiri dari 3 bahan hukum yang tersebut diatas, serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan proses penyelesaian sengketa pembagian harta warisan.

b. Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer diperoleh melalui Studi Lapangan dengan cara sebagai berikut:

1) Daftar Pertanyaan (Questionnaire)

Merupakan cara pengumpulan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan-pertanyaan kepada responden yang disampaikan secara tertulis.¹² Daftar pertanyaan ini disusun guna mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian, sehingga penelitian yang dilakukan dapat lebih terarah, tersusun secara urut dan sistematis.

2) Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan metode dimana interviewer (Pewawancara) bertatap muka langsung dengan responden untuk melakukan tanya

¹²Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*, Hal 89-90.

jawab menanyakan perihal fakta-fakta hukum yang akan diteliti, pendapat maupun persepsi dari responden, serta saran-saran dari responden yang berkaitan dengan objek penelitian.¹³ Dalam hal ini Peneliti bertindak sebagai Interviewer dan yang menjadi responden atau narasumbernya adalah Hakim Pengadilan Negeri Sragen.

5. Metode Analisis Data

Penulis menggunakan metode analisis data secara Kualitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan menganalisis data meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku kepustakaan, jurisprudensi dan literature lainnya yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pembagian harta warisan. Yang kemudian akan dihubungkan dengan data-data yang diperoleh penulis dari studi lapangan yang berupa hasil wawancara dengan responden atau narasumber yang bersangkutan, untuk kemudian dilakukan pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis dianalisis secara kualitatif untuk dicari pemecahannya sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

F. Sistematika Skripsi

Untuk mempermudah dalam membahas penelitian ini secara keseluruhan, maka dari itu penulis menyusun sistematika skripsi ini dan dibagi menjadi 4 bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

¹³Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, Hal 127.

- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Pembagian Harta Warisan
 - 1. Pengertian Harta Warisan
 - 2. Pihak-Pihak Yang Mendapatkan Hak Atas Harta Warisan
 - 3. Perjanjian Pembagian Harta Warisan Antara Ahli Waris
 - 4. Hak Dan Kewajiban Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Pembagian Harta Warisan
- B. Tinjauan Umum Tentang Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan Negeri
 - 1. Menyusun Surat Gugatan
 - 2. Mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Negeri
 - 3. Pemeriksaan Perkara Di Persidangan
 - a) Usaha Perdamaian
 - b) Pembacaan Gugatan
 - c) Jawaban Tergugat
 - d) Replik
 - e) Duplik
 - 4. Proses Pembuktian
 - a) Pengertian Pembuktian

- b) Beban Pembuktian
- c) Jenis-Jenis Alat Bukti
- d) Penilaian Pembuktian
- e) Kesimpulan Pembuktian

5. Putusan

- a) Pengertian Putusan
- b) Macam-Macam Putusan

C. Pertimbangan Putusan Hakim

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hakim dalam menentukan pembuktian atas sengketa pembagian harta warisan.
2. Hakim dalam memutuskan terhadap sengketa pembagian harta warisan yang berlaku.

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN